



Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB) Journal of Accounting and Business Dynamics

URL: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/index>



Dampak Pengendalian Intern dan Ketepatan Informasi Terhadap Kebermanfaatan Akuntansi Akrua: Studi pada Pemerintah Daerah

Ratna Fatmawati, Doddy Setiawan*

Universitas Sebelas Maret

*Corresponding author: doddy.setiawan@staff.uns.ac.id

<http://dx.doi.org/10.24815/jdab.v5i2.10900>

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 17 May 2018

Received in revised form: 10 August 2018

Accepted: 13 August 2018

Available online: 30 September 2018

Keywords:

Internal control, the accuracy of financial reporting information, decision-usefulness, accrual

ABSTRACT

This study aims at examining the effect of internal control and the accuracy of financial reporting information on the usefulness of accrual information for decision-making in Indonesian local governments. The samples of this study are financial officers in the Indonesian local governments. The questionnaires were sent to Regional Work Unit financial officers consisting of Budget Users, Finance Administering officials (PPK) and Treasurers expenditure in six local governments: Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen and Klaten. The 570 questionnaires were sent to the respondents and only 423 questionnaires that can be used and analysed, resulting in the response rate of 76.31%. A multiple linear regression was utilized for the data analysis. The result of the study shows that the internal controls and the accuracy of financial reporting information have positive influence on the usefulness of accrual accounting information for decision-making in the local governments. Thus, if the level of internal control is higher and the information is more precise, then the information will be more useful for decision-making.

©2018 FEB USK. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Konsep *New Public Management* (NPM) yang mulai berkembang sejak era tahun 1990-an mendorong cara pengelolaan pemerintahan yang berbeda dengan periode sebelumnya. Konsep ini dipopulerkan oleh Osborne & Gaebler (1993) yang berargumen pemerintahan harus berbenah diri dalam melakukan pelayanan kepada publik. Pengelolaan pemerintah harus lebih efisien dan produktif sehingga mempunyai kinerja yang lebih baik. Dunleavy & Hood (1994) menyatakan bahwa konsep NPM adalah penataan ulang pengelolaan entitas publik, seperti aspek manajemen, pelaporan dan akuntansi dengan menggunakan pendekatan bisnis. Dengan demikian, NPM juga

mengharapkan pelaporan keuangan di sektor publik juga memberikan informasi yang lebih baik dan berkualitas. Terdapat dua sistem akuntansi yang berlaku, yaitu akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi berbasis kas karena akuntansi berbasis akrual menyajikan informasi yang lebih dapat dipercaya (Aryani & Kiswanto, 2017) sehingga lebih berguna untuk pengambilan keputusan (Nogueira, Jorge, & Oliver, 2013; Nogueira & Jorge, 2016).

Tujuan dari sistem akuntansi dan pelaporan di pemerintah daerah adalah, untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian sesuai dengan peraturan, juga untuk memberikan informasi yang

tepat waktu, berguna dan dapat diandalkan, memenuhi kebutuhan berbagai pengguna informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan penting untuk meningkatkan efektifitas kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Lu, Richardson, & Salterio (2011) menunjukkan bahwa kualitas pengendalian internal berbanding lurus dengan dengan kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal yang baik akan meminimalisasi salah saji pencatatan keuangan di lingkungan pemerintah daerah (Mulyani & Suryawati, 2011). Semakin baik pengendalian internal maka semakin baik kualitas informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan. Hal ini akan meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan oleh pihak pengguna laporan keuangan.

Fenomena pentingnya pengendalian internal untuk meningkatkan kebermanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan di pemerintah daerah merupakan hal yang menarik untuk dikaji, terlebih informasi akuntansi akrual merupakan hal yang baru di pemerintah daerah. Semakin banyak temuan pemeriksaan terkait pengendalian internal, maka mengakibatkan informasi akuntansi yang digunakan untuk pengambilan keputusan menjadi bias. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 504 LKPD Tahun 2017 mengungkapkan masih terdapat banyak kelemahan pengendalian internal di Pemerintah Daerah diantaranya 6.053 permasalahan SPI (Sistem Pengendalian Internal). Permasalahan SPI tersebut meliputi 2.156 (35,62%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.657 (43,90%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.240 (20,49%) kelemahan struktur pengendalian intern (BPK RI, 2017).

Menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester I tahun 2015 atas LKPD tahun 2014 untuk pemerintah kabupaten/kota pada wilayah Subosukawonosraten juga masih terdapat permasalahan terkait dengan lemahnya pengendalian intern yang dapat dirinci : Kota

dan pengendalian internal (Nogueira & Jorge, 2012). Badara & Saidin (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan faktor yang Surakarta terdapat 5 (lima) permasalahan SPI, Kabupaten Boyolali terdapat 2 (dua) permasalahan SPI, Kabupaten Sukoharjo 8 (delapan) permasalahan SPI, Kabupaten Karanganyar terdapat 4 (empat) permasalahan SPI, Kabupaten Wonogiri terdapat 9 (sembilan) permasalahan SPI, Kabupaten Sragen terdapat 6 (enam) permasalahan SPI dan Kabupaten Klaten terdapat 5 (lima) permasalahan SPI. Informasi berbasis akrual dinilai relatif lebih berguna untuk pembuatan keputusan karena laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual telah menyajikan informasi yang paling komprehensif (Kober, Lee, & Ng, 2010).

Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas informasi. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No 71 tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Informasi keuangan yang relevan dan handal mungkin akan kehilangan relevansinya untuk pengambilan keputusan jika tidak tersedia tepat waktu (tepat waktu dalam penyajian dan pengungkapan informasi). Relevansi mempengaruhi keputusan dan hal penting dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan. Informasi yang tepat waktu akan memberikan manfaat yang lebih besar (Grossi & Reichard, 2009). Jika penyusunan dan pengungkapan

informasi dilakukan dengan tepat, memungkinkan untuk membuat keputusan dengan baik dan memberikan informasi yang memuaskan bagi pembuat keputusan (Alijarde, 1997; Andriani, Kober, & Ng, 2010 dan Kober et al., 2010)

Penelitian mengenai kebermanfaatan akuntansi akrual di sektor publik telah dilakukan oleh Andriani, Kober, & Ng (2010); Nogueira & Jorge (2012) (2016) dan Nogueira et al. (2013). Informasi yang disajikan oleh akuntansi berbasis akrual mempunyai kandungan informasi yang memang dibutuhkan pengguna laporan keuangan pemerintahan (Bergmann, 2012; Jagalla, Becker, & Weber, 2011). Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Aryani & Kiswanto (2017) dan Ferryono & Sutaryo (2017) yang mengkonfirmasi pentingnya akuntansi akrual dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah Indonesia memang mendorong penggunaan akuntansi berbasis akrual di sektor pemerintahan karena diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja entitas publik (Harun, An, & Kahar, 2013) dan meningkatkan transparansi (Christiaens, Reyniers, & Rollé, 2010) Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nogueira & Jorge (2016) menunjukkan bahwa penggunaan informasi akrual dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal entitas publik tersebut. Salah satunya adalah pemahaman yang memadai dari karyawan mengenai sistem akuntansi akrual (Harun et al., 2013; Harun, Peurseem, & VanEggleton, 2012; Nogueira & Jorge, 2016). Pemahaman pegawai yang memadai akan membantu dalam proses penyajian laporan keuangan yang tepat. Selain itu, Craft (2013) juga menyatakan bahwa kondisi organisasi juga sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Salah satu aspek penting organisasi sektor publik adalah pengendalian internal yang dilakukan. Pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Lu et al., 2011 dan Mulyani & Suryawati, 2011). Penelitian terdahulu menunjukkan kebermanfaatan akuntansi akrual untuk pengambilan keputusan

(Andriani et al., 2010; Bergmann, 2012; Kobayashi, Yamamoto, & Ishikawa, 2016; Kober et al., 2010), akan tetapi masih sedikit yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kebermanfaatan akuntansi akrual. Kebermanfaatan informasi akuntansi berbasis akrual untuk pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Nogueira & Jorge, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini meneliti secara mendalam mengenai faktor internal perusahaan yaitu ketepatan informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian internal terhadap kebermanfaatan informasi akuntansi berbasis akrual untuk pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah.

Penelitian ini difokuskan pada kelompok pengambil keputusan internal pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh pengelola keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terdiri dari Pengguna Anggaran SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan bendahara pengeluaran sebagai pengambil keputusan teknis di level operasional satuan kerja. Informasi akrual yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan dimanfaatkan oleh para pengelolaan keuangan dalam pengambilan keputusan di satuan kerja.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Pengendalian Internal

Pengendalian internal pelaporan keuangan dapat didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mampu mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat dipercaya dan mematuhi hukum dan peraturan (Petrovits, Shaspeare, & Shih, 2011). Pengertian ini bisa diterapkan pada entitas yang berorientasi keuntungan dan entitas sektor publik. Entitas sektor publik sangat erat kaitannya dengan pengendalian internal. Pada lembaga pemerintahan, maka lembaga tersebut harus

bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang diperoleh masyarakat. Pengendalian internal berfungsi untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Apakah penggunaan tersebut sudah sesuai dengan tujuannya, apakah penggunaan dana tersebut telah dikelola dengan baik? Penelitian yang dilakukan oleh Petrovits et al. (2011) menunjukkan bahwa lembaga yang memperoleh bantuan hibah dari pemerintah dan mengungkapkan adanya masalah pengendalian internal akan menerima bantuan yang lebih kecil di masa depan. Ada hubungan negatif antara masalah pengendalian internal dan pemberian bantuan di masa depan. Hal ini menunjukkan pengendalian internal merupakan hal yang penting bagi entitas sektor publik.

Pengertian sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan (PP No. 60 Tahun 2008) adalah proses yang melibatkan pimpinan dan karyawan untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara dan patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku. Pengertian pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah ini sejalan dengan pengertian pengendalian internal di lingkungan swasta, akan tetapi dengan titik berat pencapaian tujuan pemerintahan dan pengamanan terhadap aset yang dimiliki oleh negara. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani & Suryawati (2011) menunjukkan pengendalian internal mempunyai peran penting untuk meminimalisasi salah saji di laporan keuangan pemerintah daerah.

Ketepatan Informasi dalam Pelaporan Keuangan

Konsep kebermanfaatan informasi secara luas dianggap sebagai penyempurnaan beberapa karakteristik kualitatif informasi (Kober et al., 2010). *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) merekomendasikan karakteristik kualitatif utama informasi keuangan entitas publik, yaitu dapat dipahami

(*understandability*), relevan (*relevance*), dapat diandalkan (*reliability*) dan dapat dibandingkan (*comparability*). Informasi keuangan yang relevan dan handal mungkin akan kehilangan relevansinya untuk pengambilan keputusan jika tidak tersedia tepat waktu (tepat waktu dalam penyajian dan pengungkapan informasi). Relevansi mempengaruhi keputusan dan hal penting dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan. Informasi yang tepat waktu memberikan manfaat yang lebih besar (Alijarde, 1997; Grossi & Reichard, 2009). Jika penyusunan dan pengungkapan informasi dilakukan dengan tepat, memungkinkan untuk membuat keputusan dengan baik dan memberikan informasi yang memuaskan bagi pembuat keputusan (Alijarde, 1997; Bergmann, 2012).

Kebermanfaatan Keputusan Informasi Akuntansi Akrua

Menurut Suwardjono (2005) informasi dalam laporan keuangan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak, sehingga informasi tersebut harus bermanfaat atau dengan kata lain, informasi tersebut harus mempunyai nilai. Informasi dikatakan mempunyai nilai (kebermanfaatan keputusan) apabila informasi tersebut: 1) menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang dan masa datang; 2) menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian; 3) mengubah keputusan atau perilaku pemakai. Informasi berbasis akrual dinilai relatif lebih berguna dalam pembuatan keputusan. Para pengguna yakin dalam membuat keputusan, karena kualitas laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual telah menyajikan informasi yang paling komprehensif (Andriani et al., 2010; Kober et al., 2010). Akuntansi berbasis akrual, adalah basis akuntansi dimana waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat

menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Konsep *decision-usefulness* memang berawal untuk entitas bisnis. Konsep ini menyatakan bahwa pihak regulator mensyaratkan laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis (Williams & Ravenscroft, 2013). Oleh karena itu, informasi akuntansi berguna bagi pengguna laporan keuangan saat akan mengambil keputusan yang mempunyai dampak ekonomis. Lebih lanjut konsep ini juga diadopsi di sektor publik. *International Public Sector Accounting Standards Board* (2011), menyatakan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka:

- a. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut.
- b. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.
- c. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Dalam PP No 71 tahun 2010 juga dinyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah bisa digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan di laporan keuangan pemerintah diharapkan mempunyai kebermanfaatan bagi pengguna laporan keuangan yang akan membuat keputusan ekonomis. Pengguna utama laporan keuangan pemerintah terdiri dari empat kelompok yaitu: masyarakat, DPR, pihak pemberi pinjaman dan pemerintah.

Pengendalian Internal dan Kebermanfaatan Informasi Akuntansi Akrual

Penelitian yang dilakukan oleh Yamamoto (2008) menunjukkan bahwa pengendalian internal memang penting untuk kegunaan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan internal.

Misalnya, ketika menganalisis faktor-faktor penentu hubungan antara manfaat dan kegunaan informasi keuangan untuk proses pengambilan keputusan politisi pada Pemerintah pusat dan daerah di Jepang, hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa politisi di pemerintah Jepang menekankan pentingnya pengendalian internal dalam penggunaan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan mereka. Penelitian yang dilakukan Alijarde (1997) di pemerintah kota Spanyol, menunjukkan adanya hubungan positif antara pengendalian internal informasi keuangan dengan kegunaan informasi. Penelitian yang dilakukan Nogueira & Jorge (2012) di kota Braganca, menyimpulkan bahwa sebagian besar responden di kota Braganca menganggap pengendalian internal informasi keuangan penting dalam pengambilan keputusan karena pengendalian internal memberikan kontribusi untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dan memungkinkan informasi yang disajikan tepat waktu.

Penelitian mengenai sistem pengendalian internal di sektor publik di Indonesia telah dilakukan oleh Mulyani & Suryawati (2011) menunjukkan bahwa pengendalian internal yang baik dapat meminimalisasi salah saji laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Jadi, laporan keuangan yang disajikan mempunyai informasi yang lebih akurat dan tepat. Dengan demikian keberadaan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Akan tetapi, Yendrawati (2013) justru menunjukkan pengendalian internal di tingkat pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Basuki (2018) menunjukkan bahwa pengendalian internal yang baik akan berpengaruh positif terhadap pencapaian kinerja di sektor publik. Hasil penelitian Mulyani & Suryawati (2011) dan Setiawan & Basuki (2018) menunjukkan pentingnya pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

Pengendalian internal penting untuk mendukung kebermanfaatan keputusan informasi, karena dengan adanya pengendalian internal akan menjamin keakuratan, ketepatan dan keandalan informasi yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan dan menerapkan pengendalian secara baik dan benar dalam pelaporan keuangan daerah, maka tujuan pelaporan keuangan akan lebih mudah dicapai dan meminimalkan risiko. Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada dibawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan berguna untuk pengambilan keputusan internal. Terkait dengan faktor pengendalian internal tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan informasi akuntansi akrual dalam pengambilan keputusan di pemerintah daerah.

Ketepatan Informasi dalam Pelaporan Keuangan dan Kebermanfaatan Informasi Akuntansi Akrual

Menurut Kober et al. (2010) informasi keuangan yang relevan dan handal mungkin akan kehilangan relevansinya untuk pengambilan keputusan jika tidak tersedia tepat waktu (ketepatan dalam penyajian dan mengungkapkan informasi). Oleh karena itu, ketepatan waktu pengungkapan merupakan kendala dalam memberikan informasi yang relevan. Dengan demikian, ketika membahas kegunaan informasi keuangan seseorang harus menghubungkannya dengan relevansi. Relevansi mempengaruhi keputusan dan penting dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan. Informasi yang tepat waktu akan memberikan manfaat yang lebih besar (Alijarde, 1997; Grossi & Reichard, 2009). Pemerintah daerah yang mengeluarkan obligasi di Amerika Serikat akan mengalami dampak negatif

apabila laporan keuangan terlambat dikeluarkan (Henke & Maher, 2016). Harga obligasi mengalami penurunan sebanding dengan keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dixon, Coy, & Tower (1991) pada kasus di universitas New Zealand dan penelitian Smith & Coy (1999) di kota New Zealand, menemukan adanya hubungan positif antara kualitas informasi dan ketepatan/kesesuaian informasi pelaporan keuangan. Pengungkapan informasi secara tepat waktu memungkinkan untuk pembuatan keputusan dengan baik dan memuaskan kebutuhan pengambil keputusan (Alijarde, 1997). Keterlambatan penyajian informasi keuangan dalam pelaporan keuangan berarti bahwa pelaporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatan waktu, sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak bisa digunakan oleh penggunanya untuk pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Trisaptya, Perdana, & Sulardi (2016) menunjukkan bahwa pelaporan kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tepat akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga memberikan informasi yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, Winarna, Kuncara, & Setiawan (2017) membuktikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia berguna untuk menilai kondisi pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai nilai yang baik. Jadi, pengguna laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia bisa menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan. Dalam konteks informasi akuntansi berbasis akrual, beberapa peneliti seperti Kobayashi et al. (2016) menunjukkan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi berbasis akrual berguna bagi pengambil keputusan di Jepang. Hasil ini sejalan dengan penelitian Bergmann (2012) di Swis; Jagalla et al.

(2011) di Jerman; Nogueira et al. (2013), Nogueira & Jorge (2012; 2016) di Portugal yang menunjukkan peran akuntansi akrual untuk memberikan suplai informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menduga terdapat hubungan positif antara ketepatan informasi dalam pelaporan keuangan dan kebermanfaatan keputusan informasi akrual, sehingga penulis mengajukan hipotesis :

H2: Ketepatan informasi dalam pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan informasi akuntansi akrual untuk pengambilan keputusan di pemerintah daerah.

3. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN yang terdiri dari 1 kota dan 6 kabupaten yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan cara *Purposive sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan SKPD yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan bendahara pengeluaran SKPD karena setiap level pengelola keuangan berkontribusi terhadap penyusunan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah selain itu mereka sebagai pengambil keputusan internal di tingkat teknis pada satuan kerja.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari kuesioner. Dilihat dari jenis datanya penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengendalian internal dan ketepatan informasi pelaporan keuangan Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebermanfaatan keputusan informasi akuntansi akrual.

Variabel independen pengendalian internal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen yang diadopsi dari instrumen kuesioner penelitian Nogueira & Jorge (2012). Kuesioner terdiri dari 12 (dua belas) pertanyaan/ pernyataan dengan menggunakan skala Likert 5 poin (1= sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju), sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Variabel independen ketepatan informasi pelaporan keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen yang diadopsi dari instrumen kuesioner penelitian Nogueira dan Jorge (2012) yang terdiri dari 11 (sebelas) pertanyaan /pernyataan dan menggunakan skala Likert 5 poin (1= sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju) sesuai dengan penelitian sebelumnya.

Variabel dependen kebermanfaatan informasi akuntansi akrual untuk pengambilan keputusan (*decision usefulness*) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen yang diadopsi dari instrumen kuesioner penelitian Andriani et al., (2010) Kuesioner terdiri dari 19 (sembilan belas) pertanyaan/pernyataan dengan menggunakan skala Likert 5 poin (1= sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju) sesuai dengan penelitian sebelumnya.

Pada tahap awal adopsi kuesioner dari luar negeri, peneliti berkonsultasi dengan ahli di bidang bahasa inggris dan praktisi di bidang akuntansi sektor publik untuk menerjemahkan kuesioner tersebut.

Setelah melalui proses diskusi dengan kedua ahli tersebut, penelitian ini melakukan *pilot test* untuk menguji kuesioner yang menggunakan Bahasa Indonesia. Setelah selesai melakukan *pilot test*, maka kuesioner tersebut siap untuk digunakan.

Model

Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengendalian internal dan ketepatan informasi pelaporan keuangan

keuangan terhadap kebermanfaatan informasi akuntansi akrual untuk pengambilan keputusan di pemerintah daerah. Model analisis regresi dengan persamaan sebagai berikut.

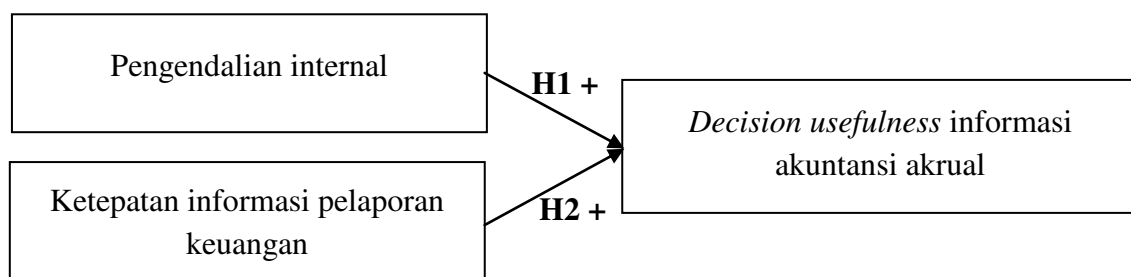
$$KK = \alpha + \beta_1 PI + \beta_2 KI + \varepsilon$$

Keterangan:

KK = Kebermanfaatan-keputusan informasi akuntansi akrual

PI = Pengendalian internal

KI = Ketepatan informasi pelaporan keuangan



Gambar 1
Model Penelitian

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan pengendalian internal, ketepatan informasi pelaporan keuangan dan kebermanfaatan informasi akrual untuk pengambilan keputusan di pemerintah daerah Subosukawonosraten. Pengumpulan data menggunakan metode survei dengan kuesioner. Kuesioner tersebut disebarkan langsung oleh peneliti kepada responden yaitu pengelola keuangan SKPD yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan bendahara pengeluaran pada Badan, Dinas dan Kantor Pemerintah Daerah di Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (SUBOSUKAWONOSRATEN). Jumlah kuesioner yang disebarkan kepada responden sejumlah 570 kuesioner dan yang diterima atau kembali sejumlah 435 kuesioner, dengan tingkat *respon rate* sebesar 76,31 %. Data yang dapat diolah lebih lanjut sejumlah 423 kuesioner.

Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah (sebagai Pengguna Anggaran/Pejabat Penatausahaan Keuangan/bendahara pengeluaran). Responden dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan SKPD sebagai pengambil keputusan teknis di tingkat operasional pada satuan kerja yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) yang dijabat oleh kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang dijabat oleh Sekretaris/Kasubag pada badan/dinas/kantor yang merupakan pengguna internal informasi akuntansi, yang memiliki wewenang sebagai penyusun laporan keuangan SKPD serta bendahara pengeluaran yang berkontribusi nyata terhadap proses penyusunan laporan keuangan SKPD serta pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Karakteristik 423 responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner penelitian dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah (Orang)	Prosentase
Jenis Kelamin		
1. Pria	259	61,23%
2. Wanita	164	38,77%
Usia		
1. < 30 tahun	21	4,96%
2. 31 – 40 tahun	87	20,57%
3. 41 - 50 tahun	99	23,40%
4. > 50 tahun	216	51,06%
Pendidikan Terakhir		
1. SMU	19	4,49%
2. Diploma	17	4,01%
3. Sarjana Akuntansi	60	14,18%
4. Pasca Sarjana Akuntansi	20	4,73%
5. Sarjana Lainnya (Non Akuntansi)	145	34,28%
6. Pasca Sarjana Lainnya (Non Akuntansi)	162	38,29%
Jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah pada SKPD		
1. PA / KPA (kepala SKPD)	135	31,91%
2. PPK (Sekretaris/kasi/kasubag SKPD)	139	32,86%
3. Bendahara pengeluaran	149	35,22%

Sumber: data primer diolah, 2016

Responden laki-laki yang menjadi sampel penelitian berjumlah 259 orang atau sebesar 61,23% dari total jumlah sampel, sedangkan sisanya sejumlah 164 orang atau 38,77% adalah responden perempuan. Distribusi usia pegawai di SKPD yang diteliti, mayoritas adalah responden dengan usia di atas 50 tahun sebanyak 216 orang atau 51,06%, kemudian diikuti responden dengan usia antara 41 sampai dengan 50 tahun berjumlah 99 orang atau 23,40%, selanjutnya usia 31 sampai dengan 40 tahun yaitu berjumlah 87 orang atau 20,57%. Jumlah responden paling sedikit adalah pengelola keuangan yang usianya di bawah 30 tahun sebanyak 21 orang atau 4,96%. Mayoritas responden dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana non Akuntansi yaitu sebanyak 162 orang atau 38,29%. Jumlah responden dengan tingkat pendidikan sarjana non akuntansi sebanyak 145 orang atau 34,28%, diikuti responden dengan tingkat pendidikan Sarjana Akuntansi sebanyak 60 orang atau 14,18%, kemudian diikuti responden dengan tingkat pendidikan Pasca

Sarjana Akuntansi sebanyak 20 orang atau 4,73% dan kemudian diikuti responden dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 19 orang atau 4,49%.

Jumlah paling sedikit adalah responden dengan tingkat pendidikan D3 (Diploma 3) sebanyak 17 orang atau 4,01%. Responden yang mengikuti survei sebagian besar menduduki jabatan dalam pengelolaan keuangan sebagai bendahara pengeluaran yaitu sebanyak 149 orang atau 35,22% dari jumlah sampel, kemudian diikuti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebanyak 139 orang atau 32,86% dari jumlah sampel, dan responden paling rendah yang mengikuti survei adalah pengelola keuangan dengan jabatan Pengguna Anggaran berjumlah 135 orang atau 31,91%.

Hasil Penelitian

Tabel 2 berikut ini menyajikan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

No	Variabel	Mean	Standar Deviasi
1	Pengendalian Intern	4,25	0,54
2	Ketepatan Informasi	3,94	0,62
3	Kebermanfaatan Informasi	3,91	0,66

Tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata pengendalian intern adalah 4,25. Kuesioner penelitian ini menggunakan skala likert 5 point. Artinya rata-rata responden menganggap pengendalian intern di pemerintah daerah sudah dilakukan dengan baik. Nilai ini memang mendekati nilai maksimal. Selanjutnya nilai rata-rata ketepatan informasi adalah 3,94. Nilai ini juga menunjukkan responden menganggap informasi yang berasal dari laporan keuangan yang menggunakan sistem akrual merupakan informasi yang tepat. Selanjutnya, variabel kebermanfaatan informasi juga menunjukkan nilai rata-rata sebesar

3,91. Nilai ini juga mendekati nilai maksimal, sehingga informasi akuntansi yang berasal dari sistem akrual mempunyai tingkat manfaat yang tinggi.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel yang diuji seperti variabel independen pada variabel dependen dengan menggunakan regresi linier berganda dengan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* 20. Berikut ini merupakan uraian hasil pengujian regresi berganda yang telah dilakukan.

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis

Keterangan	Coefficients	Nilai t	Sig.	Hasil Pengujian
(constant)	-95,411*	-6,482	0,000	
Pengendalian Internal	26,110*	4,884	0,000	H1 diterima
Ketepatan Informasi	18,193*	8,252	0,000	H1 diterima
Adjusted R-square	0,256			
F statistic	73,788			
Prob (F-statistic)	0,000			

*, signifikan pada 1%

Hasil uji statistik yang ditampilkan di Tabel 3 berhasil membuktikan bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh positif terhadap kebermanfaatan keputusan informasi akuntansi akrual di pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung secara empirik penelitian yang dilakukan Alijarde (1997), Nogueira & Jorge (2012), Mulyani & Suryawati (2011). Hal ini dapat diartikan bahwa dengan semakin baik tingkat pengendalian internal informasi keuangan dalam pengelolaan keuangan pada satuan kerja di pemerintah daerah, maka semakin berguna informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan oleh para pengelola keuangan yang dalam hal ini pengambil keputusan teknis di pemerintah daerah.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan adanya hubungan antara pengendalian internal dalam pelaporan keuangan dengan kebermanfaatan informasi akrual untuk pengambilan keputusan, jika pengendalian internal dalam pelaporan keuangan tinggi maka tingkat penyimpangan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan daerah akan berkurang. Minimnya tingkat kebocoran dan penyimpangan yang terjadi mengindikasikan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih akurat dan tepat, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dengan tepat.

Tabel 3 juga menunjukkan ketepatan informasi pelaporan keuangan mempunyai

pengaruh positif terhadap kebermanfaatan keputusan informasi akuntansi akrual dipemerintah daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan semakin tepat informasi akuntansi dalam pelaporan keuangan maka akan semakin bermanfaat informasi akuntansi tersebut untuk pengambilan keputusan. Hasil ini menunjukkan pentingnya pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tepat untuk menunjang pengambilan keputusan.

Hasil pengujian hipotesis H1 menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kebermanfaatan informasi akrual untuk pengambilan keputusan di pemerintah daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian di Portugal oleh Nogueira & Jorge (2012) dan di Spanyol oleh Alijarde (1997) yang menunjukkan pentingnya pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah. Pengendalian internal yang baik dalam pelaporan keuangan akan menjamin keakuratan, ketepatan dan keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dengan tepat. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Yendrawati (2013) di Indonesia yang menemukan pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah tidak efektif dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian ini sejalan dengan Mulyani & Suryawati (2011) yang menunjukkan pengendalian internal yang baik dapat mengurangi salah saji laporan akuntansi, sehingga dapat mendorong pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya (Setiawan & Basuki, 2018).

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa ketepatan informasi dalam pelaporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kebermanfaatan informasi akuntansi akrual untuk pengambilan keputusan di pemerintah daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya seperti Kobayashi et al. (2016), Bergmann (2012) di Swiss, Jagalla et al. (2011), S.

P. S. Nogueira et al., (2013), S. P. Nogueira & Jorge (2012; 2016) yang menunjukkan pentingnya informasi akuntansi akrual. Hal ini disebabkan informasi akuntansi memainkan peran kunci dalam organisasi (Andriani et al., 2010; Bergmann, 2012; Christiaens et al., 2010). Seperti dikemukakan oleh Kober et al. (2010) bahwa konsep kebermanfaatan informasi secara luas dianggap sebagai penyempurnaan beberapa karakteristik kualitatif informasi. Ketepatan informasi pelaporan keuangan sangat erat kaitannya dengan relevansi dan reliabilitas, sehingga dengan menyajikan informasi akuntansi secara relevan, reliabel dan tepat waktu dalam laporan keuangan, maka informasi tersebut akan tepat untuk pengambilan keputusan.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak pengendalian internal dan ketepatan informasi akuntansi berbasis akrual terhadap kebermanfaatan informasi akuntansi yang dihasilkan oleh akuntansi akrual dengan konteks pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi dugaan bahwa pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kebermanfaatan informasi akuntansi yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan sistem akuntansi akrual. Selain itu, ketepatan informasi akuntansi juga akan memberikan dampak positif terhadap kebermanfaatan akuntansi akrual.

Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah sebaiknya terus meningkatkan kualitas pengendalian internal yang ada di pemerintahan daerah. Pengendalian internal yang baik akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Peningkatan kualitas pengendalian internal dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas staf di lingkungan pengendalian internal di pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Wanke, Azad, Barros, & Hassan (2016), McLeod & Harun

(2014) dan Harun et al. (2013) yang menunjukkan pentingnya meningkatkan pemahaman staf pemerintahan mengenai akuntansi akrual untuk memaksimalkan kebermanfaatan akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya laporan keuangan yang tepat untuk mendukung pengambilan keputusan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan diantaranya, penelitian ini dilakukan pada awal tahun 2016 ketika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis *full accrual* belum selesai disusun dan diaudit oleh BPK RI, sehingga persepsi pengelola keuangan baru sebatas informasi akuntansinya saja yaitu pada tahun 2015. Akan sangat menarik, apabila penelitian selanjutnya menguji ulang hasil penelitian ini dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah menerapkan akuntansi akrual secara penuh.

Daftar Pustaka

- Alijarde, M. I. B. (1997). The usefulness of financial reporting in spanish local goverments, *13*(February), 17–34.
- Andriani, Y., Kober, R., & Ng, J. (2010). Decision Usefulness of Cash and Accrual Information: Public Sector Managers' Perceptions. *Australian Accounting Review*, 20(2), 144–153.
<https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2010.00087.x>
- Aryani, M. K., & Kiswanto. (2017). The effect of accrual-GAS on the financial reporting reliability with HR capacity as mediating variables. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 110–122.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/jda.v9i2.9733>
- Badara, M., & Saidin, S. (2013). Impact of the effective internal control system on the internal audit effectiveness at local government level. *Journal of Social and Development Sciences*, 4(1), 16–23.
<https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20130202.05>
- Bergmann, A. (2012). The influence of the nature of government accounting and reporting in decision-making: Evidence from Switzerland. *Public Money and Management*, 32(1), 15–20.
<https://doi.org/10.1080/09540962.2012.643050>
- BPK RI. (2017). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2017*. Jakarta.
- Christiaens, J., Reyniers, B., & Rollé, C. (2010). Impact of IPSAS on reforming governmental financial information systems: A comparative study. *International Review of Administrative Sciences*, 76(3), 537–554.
<https://doi.org/10.1177/0020852310372449>
- Craft, J. L. (2013). A Review of the Empirical Ethical Decision-Making Literature : 2004 – 2011. *Journal of Business Ethics*, 221–259.
<https://doi.org/10.1007/s10551-012-1518-9>
- Dixon, K., Coy, D., & Tower, G. (1991). External reporting by new zealand universities 1985–1989: improving accountability. *Financial Accountability & Management*, 7(3), 159–178.
- Dunleavy, P., & Hood, C. (1994). From old public administration to new public management. *Public Money and Management*, 0962(November), 954–962.
<https://doi.org/10.1080/09540969409387823>
- Ferryono, B., & Sutaryo. (2017). Manfaat Akuntansi Basis Akrual dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 143–158.
- Grossi, G., & Reichard, C. (2009). The limited use of financial data for governmental decision-making—An exploratory study with reference to Germany and Italy.
- Harun, H., An, Y., & Kahar, A. (2013). Implementation and challenges of introducing NPM and accrual accounting in Indonesian local government. *Public Money and Management*, 33(5), 383–388.
<https://doi.org/10.1080/09540962.2013.817131>
- Harun, H., Peurse, K., & VanEggleton, L. (2012). Institutionalization of accrual accounting in the Indonesian public sector. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 8(2), 257–285.
<https://doi.org/10.1108/18325911211258308>
- Henke, T. S., & Maher, J. J. (2016). Government Reporting Timeliness and Municipal Credit Market Implications. *Journal of Governmental & Nonprofit Accounting*,

- 5(1), 1–24.
<https://doi.org/10.2308/ogna-51601>
- Jagalla, T., Becker, S. D., & Weber, J. (2011). A taxonomy of the perceived benefits of accrual accounting and budgeting: evidence from german states. *Financial Accounting & Management*, 27(2), 134–165.
- Kobayashi, M., Yamamoto, K., & Ishikawa, K. (2016). The Usefulness of Accrual Information in Non-mandatory Environments: The Case of Japanese Local Government. *Australian Accounting Review*, 26(77), 1–6.
<https://doi.org/10.1111/auar.12093>
- Kober, R., Lee, J., & Ng, J. (2010). Mind your accruals: perceived usefulness of financial information in the Australian public sector different accounting systems. *Financial Accounting & Management*, 26(August).
- Lu, H., Richardson, G., & Salterio, S. (2011). Direct and indirect effects of internal control weaknesses on accrual quality: Evidence from a unique Canadian regulatory setting. *Contemporary Accounting Research*, 28(2), 675–707. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01058.x>
- McLeod, R. H., & Harun, H. (2014). Public sector accounting reform at local government level in Indonesia. *Financial Accountability & Management*, 30(2), 238–258.
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis peran dan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP/PP NO.60 TAHUN 2008) dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(2), 102–106.
- Nogueira, S. P., & Jorge, S. M. (2012). Adequacy of the Local Government financial reporting model in the context of internal decision-making: An exploratory study in the municipality of Bragança. *Tékhnē - Review of Applied Management Studies*, 10(2), 74–86.
<https://doi.org/10.1016/j.tekhne.2012.06.001>
- Nogueira, S. P., & Jorge, S. M. (2016). Explanatory factors for the use of the financial report in decision-making: Evidence from Local Government in Portugal. *Revista de Contabilidade*, 19(2), 216–226.
<https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2015.09.002>
- Nogueira, S. P. S., Jorge, S. M. F., & Oliver, M. C. (2013). The usefulness of financial reporting for internal decision-making in Portuguese municipalities. *Management Research*, 11(2), 178–212.
<https://doi.org/10.1108/MRJIAM-Dec-2011-0465>
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1993). *Reinventing government: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector (plume)*. New York.
- Petrovits, C., Shaspeare, C., & Shih, A. (2011). The Causes and consequences of internal control problems in nonprofit organizations. *American Accounting Association*, 86(1), 325–357.
<https://doi.org/10.2308/accr.000000012>
- Republik Indonesia. PP No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (2008).
- Republik Indonesia. PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (2010).
- Setiawan, D., & Basuki, M. A. (2018). Peran auditor intern pemerintah, motivasi, dan kinerja pegawai negeri sipil. *Jurnal Akuntansi*, XXII(01), 86–104.
- Smith, S., & Coy, D. (1999). An analysis of New Zealand city council annual reports from a public accountability perspective. In *AAANZ conference*. Cairns.
- Suwardjono. (2005). *Teori akuntansi: perencanaan pelaporan keuangan* (Ketiga). Yogyakarta: BPFE UGM.
- Trisaptiya, Y., Perdana, H. D., & Sulardi. (2016). Evaluasi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 65–73.
- Wanke, P., Azad, M. A. kalam B., Barros, C. P., & Hassan, M. K. (2016). Journal of International Financial Markets, Institutions & Money Predicting efficiency in Islamic banks: An integrated multicriteria decision making (MCDM) approach. *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, 45, 126–141.
<https://doi.org/10.1016/j.intfin.2016.07.004>
- Williams, P. F., & Ravenscroft, S. P. (2013). Rethinking decision usefulness.

Contemporary Accounting Research, XX(Xx), 1–26. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12083>

- Winarna, J., Kuncara, A. W., & Setiawan, D. (2017). Financial distress of local government: A study on local government characteristics, infrastructure, and financial condition. *Global Bussines & Finance Review*, 22(2), 34–47.
- Yamamoto, K. (2008). *What matters in legislators' information use for financial reporting: the case of Japan*. (I. da U. de Coimbra, Ed.). Inglês. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0422-0_19
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 166–175.